

**PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI PASAR
TRADISIONAL KELURAHAN SOREK SATU KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020-2021**

Oleh : Rixon Paulinus Simamora

Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The development of traditional markets in Sorek Satu Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency is increasingly rapid. So it is necessary to carry out good government management to meet the needs of the community through the policies and strategies implemented. The Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade is required to carry out its functions in order to change the public's view of traditional markets which seem dirty and seedy. The condition of this traditional market is poorly maintained, characterized by poor cleanliness, poor orderliness, facilities that are not well maintained, and the establishment of new stalls outside the market area which greatly disrupts the market arrangement.

The research uses the theory of government functions, namely service, empowerment and development by Taliziduhu Ndraha. The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is at the Traditional Market, Sorek Satu Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. Types and sources of research data are divided into primary data obtained through interviews with informants and secondary data in the form of supporting data related to the market.

The results of this research found that the function of the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade was not running well. It is characterized by not maintaining the market buildings, dirty market conditions, a lack of cleaning staff, many traders who do not comply with the rules and there is no regular guidance for market managers and traders.

Keywords: Traditional Markets, government functions, services, empowerment and development.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Kedudukan pemerintah daerah di atur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi yang dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara urusan pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi urusan pemerintahan bagian pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Kemudian urusan pemerintahan umum adalah urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka akan memberikankan keleluasaan untuk menjalankan dan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah manajemen pengelolaan pasar yang memuat tentang pembangunan, pengawasan serta pembinaan pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016 pasal 40 mengatakan bahwa bidang perdagangan terdiri dari seksi pengembangan perdagangan dan promosi, seksi kemetrolagian dan tata niaga serta seksi pengelolaan pasar.

Pada kenyataannya kondisi pasar tradisional yang ada di Kelurahan Sorek. Satu sudah dianggap tidak nyaman untuk pedagang dan para pembeli. Masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti toilet umum yang kumuh dan kondisi mushola yang tidak terawat. Akibat toilet umum dan musholah yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat di luar pasar dan tidak menggunakan toilet umum. Permasalahan fasilitas umum yang ada dipasar selalu meningkat, perawatan fasilitas umum dengan retribusi yang dibebankan kepada pedagang dan pengunjung dengan beban biaya parkir seharusnya berbanding lurus untuk perawatan fasilitas umum yang ada di pasar.

Masalah berikutnya adalah masih banyak pedagang kaki lima yang masih tidak mentaati peraturan dengan berjualan di emperan pasar, dikarenakan para pedagang kaki lima tidak mempunyai lahan untuk berjualan dan mereka semena mena

berjualan di tempat kosong sehingga mengganggu pejalan kaki dan penataan pasar menjadi tidak teratur. Keberadaan pedagang yang berjualan secara lesehan karena tidak mendapatkan tempat mengganggu akses distribusi dan lalu lintas pengunjung atau pembeli. Hal ini tentu mengurangi minat pengunjung untuk berbelanja di pasar tradisional. Tempat parkir yang sembarangan juga telah mengakibatkan kemacetan kendaraan yang melintas maupun kendaraan milik pedagang dan pengunjung.

Pemerintah semestinya sadar akan kondisi bangunan, jalan rusak, kebersihan, dan lingkungan yang kumuh pasar baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Rumusan Masalah Penelitian

Pengelolaan pasar yang kurang efektif mengakibatkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan di pasar tradisional Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, bagi pemerintahan daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan berupa saran-saran dalam pengelolaan pasar tradisional di kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten.
- b. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan pengetahuan dibidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya tentang pasar tradisional.

Kajian Teori

Fungsi pemerintahan menurut Talizidulu Ndraha (2011) terdiri dari fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

1. Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.
2. Berkaitan dengan fungsi

pemberdayaan, Taliziduhu Ndraha (2011) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti *empowering* dan dalam arti *enabling*. Dalam arti *empowering*, pemberdayaan, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Dalam arti *enabling*, pemberdayaan, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

3. Sedangkan fungsi pembangunan (*development*), pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Taliziduhu Ndraha berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi *ad interim*, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang artinya menggambarkan keadaan yang

sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi. Lokasi yang menjadi tempat penelitian saya yaitu Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dinas didapatkan informasi bahwa pelayanan yang disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan adalah menyediakan tempat berdagang berupa kios, los, tenaga kebersihan, fasilitas MCK, pos ukur ulang dan tenaga keamanan.

1. Melaksanakan pemantauan ketertiban dan kebersihan pasar.

a. Ketertiban

Penulis menemukan beberapa hal yang menimbulkan ketidaktertiban misalnya penataan kios atau los yang berdiri sembarangan oleh pedagang yang sulit diatur dan lokasi parkir yang sempit membuat banyak para pengunjung pasar memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Pada dasarnya penataan di Pasar Tradisional sebenarnya sudah cukup baik dengan zonasi berdasarkan jenis dagangannya. Misalnya seperti pedagang daging dan ikan berada di paling belakang pasar, lalu sayur-sayuran berada ditengah pasar dan buah-buahan berada paling depan pasar. Tiap zona sudah memiliki tanda keterangan yang terletak di depan agar mudah terbaca oleh pengunjung. Namun hanya beberapa kios saja yang sudah memiliki papan

nama dan identitas. Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu ini memiliki ukuran kios 3 x 2,5 meter dan los 2 x 1 meter dengan tinggi meja 80 cm. Permasalahan penataan pedagang yaitu masih banyaknya pedagang dasaran terbuka dan pancakan, yaitu pedagang yang berjualan secara lesehan dan tempatnya berpindah pindah yang keberadaannya tidak teratur sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung. Banyak pedagang yang justru membangun kios atau los di bagian depan pasar dan tepat berada di pinggir jalan serta ada juga beberapa pedagang yang membangun kios dan los tepat pada tempat parkir. Sehingga lahan parkir yang sebelumnya luas menjadi berkurang karena telah berdiri lapak para pedagang. Akhirnya terjadilah ketidaktertiban pasar mulai dari lokasi parkir yang tidak beraturan dan berdirinya kios dan los yang keluar dari zona yang sudah ditentukan oleh pengelola pasar.

2. Kebersihan

Sampah yang dihasilkan Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu bersumber dari setiap kegiatan operasional pasar. Area penghasil sampah meliputi area kios, area los, area dasaran, area halaman, area parkir, mushola, dan kamar mandi. Jenis sampah yang dihasilkan Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu berbeda karakteristiknya meliputi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah organik seperti sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah-buahan, sisa daging, kulit telur, sabut kelapa, dedaunan, untuk sampah anorganik seperti plastik, kresek, botol bekas, kaleng bekas,

karet, sedangkan untuk sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) seperti batu baterai bekas, pestisida, detergen pakaian, pembersih lantai, pembersih kaca, pengharum ruangan.

Fungsi Pemberdayaan

1. Melakukan Pembinaan Pengelola Pasar

Padagang yang ada di Pasar Tradisional tidak mengikuti aturan penertiban sehingga ada sebagian pedagang yang mau mengikuti arahan penertiban dan sebagian pedagang yang tidak. Hal ini karena ada pedagang yang tidak mau diatur sejak awal yang membuat pasar ini tidak tertata secara baik. Para pedagang lebih memilih untuk membuat lapak maupun membuat tenda baru untuk berjualan mendekati jalan sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan tidak mampu untuk menertibkan semua pedagang yang membuat penataan pasar pada saat ini akhirnya tidak tertata dengan rapi.

2. Melakukan evaluasi seksi pengelolaan pasar.

Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan laporan retribusi pasar. Retribusi yang diperoleh dari bulan Januari, Februari dan Maret terlihat sama dengan jumlah 11.046.000. retribusi ini di terima berdasarkan pengutipan setiap hari kepada para pedagang yang dilakukan oleh pengelola pasar tradisional Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras. Selanjutnya uang retribusi pasar

yang terkumpul akan masuk kedalam pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pedagang mengatakan bahwa kondisi kios dan los yang rusak tidak pernah dilakukan renovasi hingga kondisinya rusak dan tidak terawat. Jadi para pedagang pelataran ini lebih memilih untuk berjualan secara lesehan di tepi jalan atau ruang-ruang kosong.

FUNGSI PEMBANGUNAN

1. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pasar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu belum memadai. Hal ini dapat kita lihat dari area parkir yang masih memakai badan jalan yang menyebabkan kemacetan, sanitasi atau drainase yang buruk, tidak terawatnya tempat ibadah dan toilet umum, dan tidak adanya hidran kebakaran untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran di Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu.

Hasil wawancara dengan salah satu pedagang dapat disimpulkan bahwa para pedagang tidak pernah merasakan rehab kios atau pun bangunan-bangunan pasar yang sudah rusak tempat para pedagang berjualan. Sehingga para pedagang ini lebih memilih untuk merehap pribadi kiosnya dan bahkan ada yang mendirikan kios dengan tenda, papan dan seadanya saja. Sangat

disayangkan seharusnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan lebih memperhatikan bangunan kios dan los untuk para pedagang karena dapat dilihat kondisi bangunan kios dan los banyak yang sudah tidak layak pakai.

2. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

Masih banyak fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti toilet umum yang disediakan yang sudah tidak layak untuk ditempati, mushola yang tidak terawat, lahan parkir sembarangan yang berada dibahu jalan membuat para pembeli susah untuk melewati jalan. Akibat tidak terawatnya toilet dan tempat ibadah para pengunjung lebih memilih untuk melakukan ibadah di luar pasar tradisional tersebut.

KENDALA YANG DIHADAPI OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PELALAWAN

1. **Kurangnya kesadaran pedagang.**

Hasil wawancara dengan pedagang tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa adanya pedagang yang ikut-ikutan untuk berjualan di luar pasar. Hal ini akibat tidak semua pedagang ingin dipindahkan dengan berbagai alasan yang dilontarkan para pedagang. Sehingga membuat Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pelalawan tidak mampu untuk menertibkan

pedagang yang tidak mau diatur.

2. Kondisi sarana dan prasarana pasar

Kios-kios dalam keadaan rusak dan terbengkalai serta ada kios-kios yang kosong dan tidak disewa oleh pedagang. Kondisi mushola juga tidak terawat dan mulai kumuh akibat atap yang sudah mulai bocor. Selain itu kondisi toilet umum dengan kondisi tidak terawat akibat minimnya air untuk membersihkan toilet sehabis dipakai pengunjung. Tempat pembuangan sampah ataupun limbah masih belum tersedia dengan baik, banyak pedagang mau pun pembeli masih membuang sampah sembarangan. Hal ini memang terjadi karena kurangnya kesadaran para pedagang untuk hidup bersih dan kurang peduli dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat.

3. Kondisi Geografis

Apabila kita melihat posisi pasar ini berada di tengah-tengah tanah milik masyarakat. Akibatnya posisi pasar ini dimanfaatkan oleh pemilik tanah yang ada disekitar pasar untuk menyewakan tanah mereka kepada para pedagang yang ingin mendirikan kios dan berjualan. Tentu para pedagang memilih untuk menyewa tanah milik masyarakat tersebut karena posisinya berada di pinggir jalan yang mengelilingi pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras.

4. Keterbatasan Anggaran Dana Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu jika hanya bergantung pada retribusi pasar tentunya tidak akan

cukup, melihat sudah banyak bangunan dan infrastruktur lainnya yang rusak parah. Mengacu dari hasil retribusi pasar tidak mampu memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar tradisional Sorek Satu. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana retribusi pasar tidak akan cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan perawatan pasar dikarenakan jumlah retribusi pasar yang sangat rendah. Sebagaimana yang telah diketahui realisasi pendapatan dari retribusi pasar hanya sebanyak Rp. 11.046.000 sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan pasar yang sudah rusak parah dari hasil retribusi pasar tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2021 dapat diperoleh kesimpulan yaitu

1. Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Dalam bidang melaksanakan pemantauan ketertiban dan kebersihan pasar dapat diambil kesimpulan bahwa dalam bidang ketertiban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan belum mampu menertibkan para pedagang yang tidak taat aturan mengenai lokasi berjualan. Dalam hal kebersihan pasar

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan juga belum mampu untuk menangani kebersihan pasar akibat minimnya jumlah tenaga kebersihan yang disediakan hanya 4 orang padahal jumlah pedagang dan pengunjung pasar sangat banyak. Fungsi pemberdayaan adalah membentuk seorang individu dan masyarakat menjadi mandiri. Dalam hal melakukan pembinaan pengelola pasar dan pembinaan pedagang dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurang karena tidak ada pembinaan dan pengarahan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan dalam hal melakukan evaluasi seksi pengelolaan pasar juga masih kurang karena hal yang di evaluasi hanya mengenai laporan tentang jumlah pedagang, pemungutan retribusi, laporan harga barang pokok padahal hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan evaluasi adalah mengenai kondisi fisik pasar. Fungsi pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial yang mana salah satunya adalah infrastruktur. Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam hal melaksanakan pembangunan pada saat berdirinya pasar sudah cukup baik namun dalam hal rehabilitasi sarana

prasarana pasar tidak berjalan sama sekali. Sedangkan fungsi melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar juga tidak berjalan.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan fungsinya di pasar tradisional Kelurahan Sorek Satu yaitu kurangnya kesadaran pedagang, kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai dan keterbatasan anggaran dana pengelolaan pasar

Saran.

Saran yang diberikan penulis agar fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat berjalan dengan baik yaitu :

1. Diharapkan kepada aparaturnya pemerintah terkait yaitu kepala bidang pengelolaan pasar dapat bekerjasama dengan baik dengan pengelola pasar dalam hal melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada para pedagang yang tidak taat aturan.
2. Diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memberikan sosialisasi secara rutin kepada pengelola pasar dan kepada pedagang pasar agar para pedagang mematuhi tata tertib demi kenyamanan bersama.
3. Diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memperhatikan fasilitas pasar agar kelayakan

fasilitas pasar yang tersedia bisa dipakai dan digunakan dengan layak sehingga tidak ada lagi keluhan para pedagang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan seharusnya membenahi pasar secara efektif dan efisien serta meningkatkan optimalisasi pasar dalam hal sumber daya manusia agar memiliki kualitas serta kuantitas untuk pengelolaan pasar Tradisional Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Abdullah & Tantri (2016). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- AM, Miles MB & Huberman. 1987. *Analisis Data Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta.
- A.T. Soegito (2013), *Pergeseran Paradigmatic Manajemen Pendidikan*, Semarang, : Widya Karya
- Arifin, Zainal. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Bambang Istianto (2011). *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Emzir, (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grindo Persada
- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu
- Husani Usman (2014). *Manajemen : Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Herlambang, Susatyo (2014). *Basic Marketing (Dasar-dasar Pemasaran) Cara Mudah Memahami Ilmu Pemasaran*, Yogyakarta : Gosyeng Publishing.
- Karsono, dkk (2021). *Otonomi Daerah Perspektif Human Security Dalam Negara Demokrasi*
- Kusriyah (2019) *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang : Unissula Press
- Muhammad (2018), *Birokrasi, (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*, Sulawesi: Unimal Press
- Prof.Dr. Lexy J.Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Robert.dkk (2020), *Manajemen Pemerintahan*, Gorontalo : Ideas Publishing
- Sugiyono. (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif*. bandung.
- Taliziduhu Ndraha. (2011), *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta

JURNAL

Bekti Rahayu & R. Slamet (2014), Analisis Strategi Pengelolaan Pasar, Semarang. Budiyono dan Rifa Millati (2020), Analisis Penataan Dan Pengelolaan Pasar Tradisional Perumna Sklender di Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur.

Ferninda dan Tri Yuni Ningsi (2012), Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional, Jepara

Herdianto, (2018) Manajemen Strategi

Herry Dan Mohamad Aji Insani (2015), Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung

Lingga Ace (2013), Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Lingga), Tanjungpinang

Masitoh, (2013). Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan, Bantul.

Suhartono, dkk (2015). Arah Kebijakan Pembangunan Daerah: Peran Legislasi, Aspek Tematik, Dan Pemerataan, Jakarta : Penerbit Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Oliver, J. 2017. "Evaluasi Bauran

Promosi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Claine." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Indonesia No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan